

**RENCANA AKSI KEGIATAN  
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN  
MASYARAKAT  
TAHUN 2016-2019**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Pembangunan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia. Program pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 difokuskan pada Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan dengan dukungan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Renstra Kementerian Kesehatan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan berisi upaya

pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.

Renstra menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Unit Organisasi Setingkat Eselon I dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) dan selanjutnya dijabarkan pula oleh Unit Organisasi Setingkat Eselon II dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Biro Komunikasi dan Pelayanan masyarakat merupakan unit organisasi setingkat Eselon II dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun tugas yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanann masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat diharapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## **B. Kondisi Umum**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis di Kementerian Kesehatan, program kesehatan terbagi menjadi dua yaitu program generik dan program teknis.

Salah Satu program generik untuk mendukung program teknis/prioritas adalah Program Dukungan Manajmen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja yang berada dibawah Unit Organisasi Eselon I Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya oleh masing-masing unit kerja Eselon II dijabarkan kedalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 2015-2019.

Unit Kerja Eselon II Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah Unit Kerja dengan Nomenklatur Baru sebelumnya adalah Pusat Komunikasi Publik, merupakan salah satu Unit Kerja mendukung program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, unit organisasi yang mengurus fungsi pengelolaan komunikasi publik berubah dari Pusat Komunikasi Publik menjadi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Perubahan nomenklatur secara tugas dan fungsi tidak perbedaan.

Kebutuhan publik akan informasi yang cepat serta tepat dibidang kesehatan, menjadikan Biro Komunikasi dan pelayanan Masyarakat sebagai barisan terdepan kementerian kesehatan dalam menjawab kebutuhan komunikasi dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

### C. Maksud dan Tujuan.

#### 1. Maksud

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dimaksudkan sebagai salah satu dokumen acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengelolaan Komunikasi Publik dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan masyarakat	Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluarkan kepada masyarakat	7499 Publi kasi	8744 Publi kasi	9000 Publi kasi	9500 publi kasi	9850 publi kasi
			Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %

#### 2. Tujuan

Secara Umum, Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat disusun dengan tujuan terselenggaranya fungsi komunikasi dan pelayanan masyarakat yang efektif dan berhasil guna terhadap kebijakan dan program kesehatan untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mensukseskan program pembangunan kesehatan.

#### **D. Organisasi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : pengelolaan opini publik, produksi komunikasi dan peliputan; Pelaksanaan hubungan media dan Lembaga; Pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terdiri atas :

1. Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan
  - a. Subbagian Opini Publik
  - b. Subbagian Produksi Komunikasi
  - c. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi
2. Bagian Hubungan Media dan Lembaga
  - a. Subbagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial
  - b. Subbagian Komunikasi Antar Lembaga
  - c. Subbagian Tata Usaha
3. Bagian Pelayanan Masyarakat
  - a. Subbagian Pelayanan Informasi
  - b. Subbagian Pengaduan Masyarakat
  - c. Subbagian Penerbitan dan Perpustakaan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik RI yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya mewujudkan visi adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional serta.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut diatas telah, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

## **B. Tujuan**

Secara umum terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 yaitu :1). Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2).Meningkatnya daya tanggap (responsivineess) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia.

Tujuan Indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome), dalam dalam peningkatan status kesehatan masyarakat indikator yang aka dicapai adalah :

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012)
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjaid 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00

Bahwa secara khusus tujuan program kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam kurun waktu 2016-2019 adalah terselenggaranya kegiatan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat dengan sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan masyarakat

### C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis kementerian kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%
  - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi sebesar 18,2%
  - c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan hidup bersih dan sehat (PHBS) sebesar 80%
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%
  - b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%
  - c. Kab/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%
  - d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia  $\leq 18$  tahun sebesar 5,4%
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.6000.
  - b. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 Kab/Kota.
4. Meningkatnya akses kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%
  - b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
  - c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%
5. Meningkatnya jumlah, jenis kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas
  - b. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%
  - c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang



6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan
  - b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendaot predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
  - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
  - c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintergrasi dari berbagai suber sebanyak 34 provinsi
  - b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah
  - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
  - c. Jumlah laporan riset kesehatan nasional (Riskesdas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara  $\leq 1\%$  sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
  - b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
- a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
  - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan**

##### **1. Arah dan Kebijakan**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah dan kebijakan strategi pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Arah kebijakan kementerian kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
2. Penerapan Pendekatan berkelanjutan (continuum Of Care)
3. Intervensi berbasis risiko kesehatan

Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan, maka arah kebijakan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.
2. Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang pro aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan
3. Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan pembangunan kesehatan

4. Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan
5. Mengembangkan dan memperkuat system monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang.

## 2. Strategi.

Sasaran pembanguan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Dalam RPJMN 2015-2019, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran Pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut :

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,50
	c. Jumlah Kabupaten/Kota mencapai eliminasi Malaria	212 (2013)	300
	d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	e. Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
	f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>		
	a. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
	b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
	c. Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan</b>		
	a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
	c. Persentase RSUD Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
	d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90,0
	e. Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi :

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas.
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat.
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan
9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Memperkuat manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi.
11. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan
12. Mengembangkan dan meningkatkan nektifitas pembiayaan kesehatan.

Dalam upaya mendukung pencapaian arah, kebijakan dan sasaran pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019, maka strategi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam menjabarkan pencapaian target kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat tahun 2016-2019 sebagai berikut :

1. Membangun hubungan internal dan eksternal
2. Membangun sinergi strategi komunikasi dan publikasi pusat dan daerah
3. Membangun komunikasi melalui berbagai saluran informasi yang berkembang
4. Membangun pelayanan publik yang profesional dan prima

## **B. Isu Strategi Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJM Bidang Kesehatan dan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 2015-2019, maka isu strategi yang dijabarkan pencapaian kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.  
Rokomyanmas Kemenkes harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan solusi strategis bagi seluruh kebutuhan dan permasalahan komunikasi yang dimiliki dan dihadapi oleh Kemenkes, khususnya yang terkait dengan media massa, publik, dan pemangku kepentingan.

2. Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan.  
Rokomyanmas Kemenkes harus menjalankan kegiatan komunikasi publik dan hubungan timbal balik yang didasarkan kepada perencanaan jangka panjang, pengetahuan dan pengenalan terhadap kepentingan atau isu yang dibawa oleh pihak-pihak sasaran, dan berjalan selaras menuju pencapaian visi Kemenkes.
3. Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan pembangunan kesehatan.  
Rokomyanmas Kemenkes harus menjadi pintu gerbang komunikasi antara Kemenkes dengan publik melalui penyediaan dan pengelolaan akses bagi publik dan pemangku kepentingan terhadap kebutuhan informasi dan penyaluran aspirasi.
4. Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan.  
Rokomyanmas Kemenkes harus dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berpotensi menjadi mitra dan membangun kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan dan program komunikasi publik Kemenkes, untuk mencapai pihak atau audiens sasaran yang lebih luas.
5. Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang.  
Rokomyanmas Kemenkes harus memiliki sumberdaya perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan monitoring dan analisa regular terhadap opini dan isu yang berkembang, dan mampu menggunakan hasil tersebut bagi pengambilan kebijakan atau keputusan, khususnya yang terkait masalah komunikasi Kemenkes.

### **C. Sasaran Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat**

Dengan lima isu strategis pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terkomunikasikan dan tersosialisasikannya kebijakan, program, pencapaian, dan pandangan Kemenkes kepada pemangku kepentingan. Tercapainya sasaran ini akan menciptakan pemahaman dan persepsi yang positif dari pemangku kepentingan terhadap Kemenkes.
2. Terwujudnya peran pemberian masukan strategis (strategic advisory) Rokomyanmas Kemenkes bagi para penentu kebijakan Kemenkes. Sasaran ini sejalan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Rokomyanmas yang berada dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes.

3. Terciptanya hubungan yang terbuka, interaktif, dan saling menghormati dengan para pemangku kepentingan. Tercapainya sasaran ini akan mendukung penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan kesehatan dan penanganan isu secara objektif, cepat, dan tepat.
4. Tersedianya sarana dan materi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, serta sistem dan sarana untuk menerima dan menyalurkan masukan dari dan kepada publik. Tercapainya sasaran ini akan menciptakan interaksi Kemenkes dengan publik sehingga dapat mendukung pencitraan positif Kemenkes sebagai lembaga yang terbuka dan berpihak kepada rakyat.
5. Tersedianya sistem monitoring dan analisa terhadap pemangku kepentingan, pendapat dan pandangan publik, dan isu yang terkait dengan lembaga, serta rekomendasi strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang. Tercapainya sasaran ini akan mendukung pengembangan strategi dan program komunikasi publik yang antisipatif dan responsif.
6. Tersedianya evaluasi dan masukan bagi pengembangan kebijakan dan program komunikasi publik. Dengan tersedianya evaluasi maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rokom Yanmas Kemenkes dapat diukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Pencapaian Sasaran.**

Upaya mewujudkan sasaran tersebut diatas arah dan kebijakan pencapaian sasaran yang akan ditempuh adalah :

1. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, melalui strategi penguatan komunikasi interaktif antara pemerintah dan rakyat.
2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan pemanfaatan, melalui strategi diseminasi informasi publik terkait prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja**

Mengacu pada target kinerja dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, target kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah masuk di dalam dukungan Program Generik yaitu pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan sasaran kegiatan pengelolaan komunikasi publik.

**Matrik Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengelolaan Komunikasi Publik dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya pengelolaan komunikasi Publik dan pelayanan masyarakat	Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluarkan kepada masyarakat	7499 publikasi	8744 publikasi	9000 publikasi	9500 publikasi	9850 publikasi
			Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %

**B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 64 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan opini publik, produksi komunikasi dan peliputan
- 2) Pelaksanaan hubungan media dan lembaga
- 3) Pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat; dan
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro



### **C. Kegiatan-Kegiatan yang akan dilaksanakan**

Dari sasaran, indikator, target, tugas dan fungsi yang telah dijelaskan, berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pengelolaan opini publik
  - a. Melakukan analisis berita di media massa, elektronik dan media social
  - b. FGB manajemen isu dan strategi komunikasi
2. Memproduksi bahan komunikasi publik
  - a. Melakukan diseminasi publikasi program pembangunan kesehatan melalui media cetak, elektronik, media social (pembuatan talkshow, advertorial, filler, ilm)
3. Peliputan dan dokumentasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan
  - a. Pembuatan publikasi berita dalam bentuk foto
  - b. Pembuatan publikasi berita dalam bentuk video
  - c. Melakukan pameran foto
4. Pengelolana komunikasi public dengan media massa dan media social
  - a. Jumpa pers, press briefing
  - b. Kunjungan lapangan tematik
  - c. Reportase berita
5. Pengelolaan komunikasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
  - a. Sosialisasi Program dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
  - b. FGD dan Dialog interkatif
6. Pengelolaan Pelayanan Informasi (PPID, ULT)
  - a. Pengembangan sistem layanan (hardware dan software)
  - b. Koordinasi dengan stakeholder
7. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (contact center 1500567 & SIAP)
  - a. Pengembangan system layanan (hardware dan software)
  - b. Koordinasi dengan stakeholder
8. Pengelolaan Penerbitan dan Layanan Perpustakaan
  - a. Penerbitan Majalah Internal
  - b. Pengembangan system layanan perpustakaan (hardware dan software)
  - c. Koordinasi dengan stakeholder
9. Dukungan Layanan internal organisasi (pembinaan perencanaan dan monev anggaran, pembinaan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kapasitas SDM, Pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
10. . Operasional dan pemeliharaan perkantoran

#### **D. KERANGKA PENDANAAN**

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dibutuhkan pembiayaan yang alokasi anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang bersumber dana Rupiah Murni dengan kerangka pendanaan sebagai berikut :

Adapun untuk menggambarkan secara rinci target kegiatan dan kerangka pendanaan dapat dilihat dalam lampiran 1.

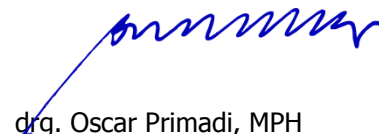
## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Rencana Aksi Kegiatan ini yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam kurun waktu 2015-2019 sehingga pencapaian hasil indikator kinerja kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Sekretariat Jenderal dapat terukur dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja.

Keberhasilan implementasi rencana aksi kegiatan ini tentunya membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan, sumber daya dan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas sehingga akan terwujud komunikasi dan pelayanan masyarakat yang baik.

Jakarta, April 2016  
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan  
Masyarakat

  
drg. Oscar Primadi, MPH  
NIP.196111201988031013